

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan dunia bisnis dan perekonomian yang semakin terbuka perusahaan perlu meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan entitas lainnya. Persaingan bisnis baik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta dituntut guna meningkatkan kondisi perusahaan agar mampu bertahan. Hal tersebut dikarenakan pada dunia usaha yang akan mampu bersaing ialah perusahaan yang unggul dan kompetitif, sebab bila dilihat di Indonesia banyak sekali perusahaan yang beroperasi.

Akuntansi pada perusahaan dinilai penting karena dapat memberikan informasi mengenai keadaan keuangan dan kinerja sebuah perusahaan. Perusahaan di Indonesia menggunakan akuntansi dalam pelaksanaan dan penerapan standar guna menyusun laporan keuangan. Pada saat laporan keuangan disusun biasanya Prinsip-prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) digunakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dibentuk dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar akuntansi berguna bagi pemangku kepentingan agar disajikan laporan keuangannya melalui dasar aturan pengakuan, pengungkapan, penyajian, dan pengukuran. Selain itu, kualitas penyusunan laporan keuangan di Indonesia bisa ditingkatkan efisiensi dan standar kualitasnya melalui standar akuntansi.

Di Indonesia, standar akuntansi mengalami perkembangan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan informasi laporan keuangan yang mudah dimengerti serta bisa dipergunakan oleh pihak lainnya seperti investor, kreditur, dan auditor. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) semenjak tahun 2008 sudah mengidekan program konvergensi PSAK ke IFRS yang sebelumnya PSAK mengacu pada GAAP. Atas program konvergensi tersebut, pada tahun 2012, IFRS diterapkan secara keseluruhan. PSAK berbasis IFRS menyebabkan beberapa perubahan dalam pengungkapan, pengukuran, penyajian, serta prinsip atau aturan yang diterapkan pada laporan keuangan.

Penerapan konvergensi secara keseluruhan dapat dilihat pada PSAK baru yang mana pada 26 Juli 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkannya dan pada tanggal 1 Januari 2020 baru berlaku efektif. PSAK baru tersebut antara lain: PSAK 71 mengatur IFRS 9 yang menjadi acuan pada Instrumen Keuangan, PSAK 72 mengatur IFRS 15 yang menjadi acuan pada Pendapatan dari Kontrak dengan Konsumen, serta PSAK 73 mengatur IFRS 16 yang menjadi acuan pada Sewa.

PSAK 72 menjadi yang baru pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dimana merupakan standar yang berkaitan pada pengakuan pendapatan. PSAK 72 menggantikan PSAK terdahulunya seperti PSAK 23 tentang Pendapatan, PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi, PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate, ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat, dan ISAK 27 tentang Pengalihan Aset Dari Pelanggan. PSAK 72 menjadi gebrakan besar bagi pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan melalui pengaturan akuntansinya (Investasi, 2019).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Puspamurti & Frimansyah (2020), PSAK 72 mengatur yang mana entitas mesti mampu melakukan identifikasi setiap kontrak dengan pelanggan yang dimiliki sebelum mengakui perolehan pendapatannya termasuk syarat khusus pada aktivitas pengakuan pendapatan. Adapun kriteria khusus pengakuan pendapatan melalui PSAK 72 memerlukan lima tahapan untuk menganalisis transaksi antara lain: (1) Dengan pelanggan dilakukan identifikasi dulu, (2) melakukan identifikasi kewajiban pelaksanaan, (3) harga transaksi ditentukan, (4) terhadap kewajiban pelaksanaan harga transaksi dialokasikan, serta (5) sewaktu kewajiban pelaksanaan terselesaikan oleh perusahaan, diakui pendapatannya.

Perubahan standar baru memiliki perbedaan dalam pengakuan pendapatan. Telah diatur dari standar baru yang mana pendapatan yang diakui bukan sejumlah uang tanda jadi yang diterima, akan tetapi berdasarkan pada pelanggan atas kewajiban kontraknya sesuai dengan kesepakatan kontrak. Adapun pengakuan pendapatan pada standar baru ini dapat dilakukan secara berangsur sesuai umur kontrak disepakati (*over time*) atau dapat dilakukan pada titik tertentu (*at point in time*). Pengakuan pendapatan yang dijalankan secara berangsur terdapat syarat tertentu yang mesti dipenuhi seperti klien yang menerima adanya aset yang meningkat serta atas suatu kontrak tertentu, sebuah perusahaan sudah melakukan pemenuhan kewajiban. Apabila syarat belum terpenuhi, dengan begitu pengakuan pendapatan baru akan terjadi ketika proses penyerahan aset telah dilakukan.

PSAK 72 menjadi perubahan standar baru atas pendapatan baru yang diakui melalui kontrak dari pelanggan dimana pendapatan yang diakui diubah modelnya. Hal tersebut akan sangat memberikan pengaruh pada laporan keuangan dan juga bisa memberi dampak perubahan dari kinerja keuangan perusahaan. Keadaan tersebut disebabkan PSAK 72 karena pada pendapatan perusahaan ada pengakuan, pengungkapan, pelaporan, dan penyajian yang berbeda. Sebagaimana dapat dilihat dalam penelitian sebelumnya oleh Casnila & Nurfitriana (2020) atas perubahan dalam standar baru ini memperlihatkan yang mana setelah PSAK 72 diterapkan, kinerja keuangan pada perusahaan Telekomunikasi berdampak terhadap *current ratio* sebelum dan sesudah melakukan penerapan PSAK 72. Hal tersebut dikarenakan dari jumlah aset lancar perusahaan yang menurun melalui arus kas

yang diterima dimana didapati melalui perubahan pengakuan pendapatan operasi perusahaan. Pada penelitian tersebut, liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek memperlihatkan penurunan kinerja, akan tetapi dengan metode pengakuan pendapatan (*debt to equity ratio*) tidak terdapat kaitannya.

Perubahan pengakuan pendapatan melalui kontrak dengan pelanggan juga berpengaruh terhadap sektor *Property, Real Estate And Building Construction* yang mana penelitian terdahulu dilakukan Agustrianti *et al.* (2020). Perusahaan yang menerapkan PSAK 72 sejak dini terhadap kinerja keuangan terdapat pengaruh melalui pengukurannya menggunakan *net profit margin* (NPM). Melalui penelitiannya didapati hasil yang memperlihatkan dimana entitas yang menerapkan PSAK 72 secara dini di tahun 2019 mempunyai kinerja keuangan yang lebih baik bila disandingkan dengan tahun 2018. Hal tersebut disebabkan terdapat pertimbangan pada pendapatan jangka panjang atas kontraknya, dengan begitu memberi dampak yang signifikansi kepada laporan keuangan konsolidasian. Untuk hal itu, pengakuan pendapatan menjadi salah satu akun penting bagi informasi keuangan perusahaan karena pendapatan dapat menjadi indikator suatu perusahaan dalam mengukur kinerja keuangannya serta bisa berperan sebagai tolok ukur perusahaan guna memperoleh laba pada perusahaan. Bilamana sewaktu pengakuan pendapatan itu perusahaan tentukan dengan keliru bakal menciptakan keputusan yang diambil menjadi salah (Chadani, 2015)

Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa sektor *Property, Real Estate, Building Construction*, dan Telekomunikasi mempunyai dampak terhadap perubahan standar baru PSAK 72. Sebagaimana hal tersebut diungkapkan oleh Rosita Uli selaku Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN-IAI) dalam media online *jpnn.com* bahwa dampak penerapan IFRS 15 (acuan standar dari PSAK 72) berlaku untuk semua industri yang tidak ada batasannya teruntuk industri ritel, telekomunikasi serta kontrak konstruksi. Penerapan atas PSAK 72 juga memiliki pengaruh terhadap sektor industri lain, contohnya seperti pada sektor manufaktur, penerbangan, listrik, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan perubahan standar baru PSAK 72 akan memiliki dampak yang berbeda pada setiap sektornya. Salah satunya sektor infrastruktur

yang mana memiliki pengaruh terhadap pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan.

Pembangunan infrastruktur ialah sebuah hal utama teruntuk suatu negara agar dapat mendorong peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur adalah fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa itu fisik ataupun non fisik yang difungsikan pada berbagai kegiatan masyarakat sehari-hari. Sektor infrastruktur memiliki potensi untuk tumbuh sehingga banyak investor tertarik untuk membeli saham pada sektor ini. Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange*, sektor infrastruktur terbagi menjadi beberapa subsektor antara lain *Airport operators*, Jalan raya dan kereta api, Pelabuhan dan layanan laut, Konstruksi berat dan Teknik sipil, Layanan telekomunikasi berkabel, Utilitas listrik, dan Utilitas Gas. Sektor ini memiliki saham yang beberapa tahun belakangan indeks pergerakan saham pasar modalnya stabil bahkan cenderung naik. Hal tersebut tidak jatuh jauh atas kebijakan pemerintah yang memfokuskan pembangunan infrastruktur pada beberapa tahun terakhir di setiap daerah di Indonesia. Pembangunan jalan tol, bandara, bendungan, dan berbagai infrastruktur penunjang lainnya menjadi fokus pemerintah sebagai upaya peningkatan ekonomi. Dengan melihat kinerja saham sektoral di BEI sampai dengan periode kuartal-3 tahun 2019, sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi memiliki kinerja saham teratas dengan penguatan 15,17% ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)).

PT PLN sebagai perusahaan infrastruktur yang termasuk dalam sub sektor utilitas listrik. Pengaruh atas perubahan standar baru PSAK 72 dapat dilihat dari tahun 2020 atas laporan keuangan PT PLN (Persero). Pada laporan keuangannya, perusahaan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 345,42 triliun. Berdasarkan pernyataan Zulkifli Zaini Direktur Utama PT PLN (Persero) pada media online cnbc, jika pencatatan pengakuan pendapatan dilakukan sama seperti tahun 2019 yang belum menerapkan PSAK 72 maka dari penyambungan pelanggan atas pengakuan pendapatan dapat bertambah dengan besaran Rp 5,9 triliun. Dengan demikian, penerapan PSAK 72 memiliki perbedaan dan pengaruh atas pengakuan pendapatan.

Selain perusahaan dari utilitas listrik, perusahaan subsektor atas *heavy construction and civil engineering* yaitu WSKT juga memiliki pengaruh dan

perbedaan setelah dilakukannya penerapan PSAK 72. Berdasarkan media online vibiznews.com, sebesar Rp 16,2 Triliun menjadi pendapatan usaha yang dibukukan untuk menutup tahun 2020 oleh Waskita. Pendapatan usaha yang menurun pula mengakibatkan cukup signifikan atas kerugian bersihnya sesuai yang dicatat Waskita. Sampai dengan Kuartal III-2020, derita rugi kembali dialami WSKT yang sebesar Rp 2,63 triliun kepada pemilik entitas induk bisa diatribusikan. Dimana dari tahun sebelumnya dengan periode yang sama, WSKT tetap menerima laba Rp 1,15 triliun. Hal tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa proyek yang menunda pembayaran dan secara penuh penerapan PSAK menjadi alasan turunya kinerja keuangan WSKT.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah terjadi dan terdapatnya pengaruh dari beberapa sektor perusahaan setelah adanya penerapan PSAK 72, maka peneliti ingin melihat bagaimana perbandingan penerapan PSAK 72 sebelum dan sesudahnya dilihat pada kinerja keuangannya. Penelitian memanfaatkan perusahaan infrastruktur yang tercatat dalam klasifikasi IDX-IC karena perusahaan infrastruktur memiliki beberapa sub industri yang setiap industrinya memiliki dampak sesudah melakukan pengakuan pendapatan pada PSAK 72. Adapun penelitian yang dilakukan merujuk penelitian terdahulu oleh Casnila & Nurfitriana (2020) dengan perbedaan, yaitu (1) sektor perusahaan yang diteliti ialah sektor infrastruktur, (2) sampel yang diteliti lebih banyak, dan (3) pengukuran *debt asset to ratio* sebagai rasio solvabilitas pada kinerja keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, atas fenomena yang terjadi, peneliti termotivasi menjalankan penelitian dengan menganalisis perbandingan atas perubahan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 mengenai pendapatan kontrak dengan pelanggan terhadap kinerja keuangan. Adapun kontribusi melalui penelitian yang diperoleh hasil bisa difungsikan sebagai bukti empiris mengenai pengaruh sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan di perusahaan sektor infrastruktur. Lebih dari itu, penelitian ini dapat menjadi referensi atas penerapan standar baru terutama PSAK 72 yang mengadopsi secara penuh atas IFRS 15. Untuk itu, judul dalam penelitian ini ialah **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan PSAK 72 Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”**.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Melalui penelitian yang dijalankan perumusan masalah atas latar belakang penelitian adalah Bagaimana kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dalam penelitian ialah guna mendapati perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Menjadi harapan peneliti agar melalui penelitian ini mampu memberikan manfaat teruntuk penggunaanya. Manfaat secara praktis maupun teoritis dari penelitian ini, yaitu:

1) Aspek teoritis:

Menjadi harapan peneliti agar melalui penelitian ini mampu memberikan pengetahuan terkait penerapan atas perubahan standar akuntansi yaitu PSAK 72 pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI dan perbedaannya terhadap kinerja keuangan sebelum dan sesudah melakukan penerapan.

2) Aspek praktis:

a. Bagi Akademisi

Menjadi harapan peneliti agar melalui penelitian bisa menyuntikkan pemahaman yang lebih bagi peneliti dan dapat menjadi sumber dalam penelitian selanjutnya khususnya mengenai penerapan PSAK 72.

b. Bagi Investor

Menjadi harapan peneliti agar melalui penelitian bisa dijadikan bahan pertimbangan dan tambahan informasi sewaktu pengambilan keputusan untuk dalam melakukan investasinya.

c. Bagi Manajemen

Menjadi harapan peneliti agar melalui penelitian mampu menjadikan tolok ukur teruntuk para manajemen perusahaan sewaktu menghadapi perubahan atas standar akuntansi terutama pada PSAK 72.